

***Connective Action* dalam Gerakan Mahasiswa: Studi Kasus Aksi Demonstrasi Mahasiswa Indonesia pada September 2019**

Rangga Kusumo¹, Aditya Perdana²

¹Rangga Kusumo, Rangga Kusumo

²Aditya Perdana, Aditya Perdana

kusumorangga@gmail.com, secondauthor@email.com

Email Korespondensi: kusumorangga@gmail.com

Abstract (english):

Abstract: *After the 1998 Reform, the student movement in Indonesia Has more freedom to protest because it is guaranteed by the constitution. The Advances in technology are progressively making student movements appear to be more creative and involve various elements by utilizing social media. In September 2019, there were a series of student demonstrations centered in front of the Indonesian Parliament Building (DPR). The form of demonstrations was not only massively done in the field (offline), but also massively done on social media (online). This research uses a qualitative approach with a case study method. The research instrument used to obtain data is through interviews and literature studies. Referring to the theory of Bennet and Segerberg (2013) about connective action, this research found that there was a connection between the September 2019 student demonstrations with digital actions in the shape of personal action frames. The Twitter accounts that was identified, they were engaged in conversations on social media and expressed their personal attitudes through various forms, for examples were photos, videos, and posters. All of these accounts were related and created a collective cluster by means of the same hashtag and narrative, namely to reject the Draft Legislation of Criminal Code (RKUHP), revisions to the KPK Law and other Draft legislations those were deemed problematic. The student demonstration in September 2019 is included in the typology of organizationally-enabled action since it did not only occur massively in the field (offline), but also occurred in a hybrid way in digital media (online). The formal structure, namely the Indonesian Student Alliance (Aliansi Mahasiswa Indonesia), had the role of coordinating actions in the field, as well as social media which led to open widely of participation from various groups to get involved in the action. Nevertheless, the massive digital action that occurred, was not the part in the design of the student movement, but occurred organically and naturally.*

Keywords: demonstration action, connective action, personal action frame, organizationally-enabled action

Abstrak (Bahasa):

Abstrak Pasca reformasi 1998 gerakan mahasiswa di Indonesia leluasa melakukan protes karena dijamin oleh konstitusi. Kemajuan teknologi semakin membuat gerakan mahasiswa tampil lebih kreatif dan melibatkan ragam elemen dengan memanfaatkan media sosial. Pada September 2019 terjadi serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa yang berpusat di depan Gedung DPR RI. Bukan hanya masif di lapangan (*offline*), aksi juga masif terjadi di media sosial (*online*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan studi literatur. Mengacu pada teori Bennet dan Segerberg (2013) tentang *connective action*, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi koneksi pada aksi demonstrasi mahasiswa September 2019 dengan aksi digital dalam bentuk *personal action frame*. Akun-akun Twitter yang teridentifikasi terlibat dalam percakapan di media sosial mengekspresikan sikap personal mereka melalui ragam bentuk, mulai dari foto, video, maupun poster. Semua akun tersebut disatukan dan membentuk satu kluster bersama melalui tagar dan narasi yang sama, yaitu menolak RKUHP, revisi UU KPK dan RUU lainnya yang dianggap bermasalah. Aksi demonstrasi mahasiswa September 2019 termasuk dalam tipologi *organizationally-enabled action* karena bukan hanya terjadi masif di lapangan (*offline*), melainkan terjadi juga secara *hybrid* di media digital (*online*). Struktur formal yaitu Aliansi Mahasiswa Indonesia berperan mengoordinasikan aksi di lapangan, sekaligus media sosial telah membuka partisipasi yang luas dari berbagai kalangan untuk terlibat aksi. Namun demikian, masifnya aksi digital yang terjadi bukan merupakan desain dari gerakan mahasiswa, melainkan terjadi secara organik dan natural.

Kata Kunci: Aksi demonstrasi, *connective action*, *personal action frame*, *organizationally-enabled action*

PENDAHULUAN

Gerakan mahasiswa di Indonesia selalu mengambil peran penting dalam berbagai peristiwa bersejarah bangsa. Studi Meredith Weiss and Edward Aspinall (2012) menjelaskan gerakan mahasiswa di Indonesia selalu menentukan masa depan bangsa dalam beberapa peristiwa penting, diantaranya Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga tahun 1998 mahasiswa sebagai pelopor reformasi. Weiss dan Aspinall (2012) menjelaskan gerakan mahasiswa di Indonesia pada 1998 tampil sebagai pemimpin gerakan protes yang berujung pada penggulingan rezim otoriter. Pasca reformasi 1998, kehidupan berdemokrasi di Indonesia semakin membaik. Berbeda situasinya saat sebelum reformasi, gerakan mahasiswa saat ini tidak lagi berhadapan dengan rezim otoriter, melainkan melakukan aksi-aksi protes terhadap kebijakan negara yang dianggap merugikan rakyat Indonesia, seperti pada tahun 2000an gerakan mahasiswa menolak liberalisasi dan komersialisasi pendidikan (Husin, 2014).

Seiring dengan kemajuan teknologi, strategi gerakan mahasiswa di berbagai negara menjadi lebih beragam dan kreatif, tidak hanya sebatas aksi demonstrasi turun ke jalan. Terjadi transformasi gerakan sosial yang sebelumnya hanya dilakukan secara langsung pada ruang publik kini dilakukan di ruang digital. Media sosial telah digunakan sebagai sarana dalam gerakan sosial (Arum, 2017). Di berbagai negara di dunia media sosial menjadi instrumen dalam gerakan mahasiswa. Di Amerika Latin, studi Scherman, Valenzuela & Arriagada (2014) menjelaskan gerakan mahasiswa di Chili pada 2011 yang menolak liberalisasi pendidikan dan masalah lingkungan menunjukkan media sosial berperan penting dalam koordinasi dan motivasi seseorang terlibat dalam gerakan sosial (Andrés Scherman et al, 2015: 151-171). Di Taiwan, terjadi aksi mahasiswa pada 2014 yang disebut (*The Sunflower Movement*) sebagai protes terhadap perjanjian perdagangan bebas antara Taiwan dan Beijing. Media sosial dan internet yang interaktif telah membantu mahasiswa dalam melakukan komunikasi dan memobilisasi massa untuk mencapai tujuan mereka (Khan 2020). Pada kasus Indonesia, studi Nadiatul Muflihah dkk (2019) menemukan penggunaan media sosial *Line* grup efektif dalam mendorong gerakan mahasiswa melekat politik bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta (Muflihah 2019).

Pada September 2019, terjadi serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Tidak hanya masif di lapangan secara langsung (*offline*), aksi digital (*online*) juga terjadi di media sosial. Aksi demonstrasi mahasiswa September 2019 menolak beberapa RUU yang dinilai bermasalah karena merugikan rakyat, diantaranya RKUHP yang dinilai beberapa pasalnya kontroversi seperti pasal penghinaan presiden, aborsi dan lainnya, Revisi UU KPK



yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi, isu lingkungan agar negara mengusut dan mengadili elit-elit pelaku perusakan lingkungan di Indonesia, RUU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja, RUU Pertahanan yang dinilai mengkhianati semangat reforma agraria (detik.com, 26 September 2019). Puncak aksi demonstrasi terjadi pada 23-24 september 2019 dan berhasil memobilisasi massa dengan jumlah besar mencapai belasan ribu orang (cnnindonesia.com, 24 September 2019).

Selain masif terjadi di jalanan dalam bentuk aksi demonstrasi, di media sosial terjadi juga aksi digital. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai salah satu bagian dari Aliansi Mahasiswa Indonesia mengoptimalkan berbagai media sosial yang dimiliki untuk mempublikasikan konten seputar demonstrasi #TuntaskanReformasi. Diantaranya melalui Instagram (@bem_si), Facebook (BEM Seluruh Indonesia), dan Twitter (@BEMIndonesia). Akun media sosial tersebut memiliki jumlah pengikut yang relatif banyak, misalnya Instagram saja telah memiliki jumlah pengikut sebanyak 217.000 pengikut (Data per 3 Juni 2022). Salah satu konten media sosial yang dibuat oleh BEM SI adalah video publikasi seruan mengikuti aksi dari Koordinator Pusat BEM SI kepada seluruh mahasiswa Indonesiayang telah ditonton 166.000 kali.

Studi-studi mengenai hubungan gerakan mahasiswa dengan media sosial lebih banyak menempatkan media sosial sebagai instrumen yang memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Misalnya yang dilakukan oleh Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI (2019) yang meneliti platform media sosial Twitter dapat memengaruhi pola perilaku dan motif mahasiswa dalam melakukan aksi demonstrasi pada 2019 (Peneliti KANOPI FEB UI & KSM Eka Prasetya, 2019). Studi-studi lain yang sudah dilakukan seputar aksi demonstrasi mahasiswa tahun 2019 membahas membahasnya dalam perspektif masyarakat sipil (Mahpudin Dkk 2020; Robet 2020), menganalisis akar persoalan yang menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa dan respon yang dilakukan pemerintah (Wasisto & Prayudi 2019), menganalisis tindakan represif oleh negara yang telah menutup perlahan kebebasan masyarakat sipil dalam aksi mahasiswa 2019 (LBH Jakarta 2019), serta meneliti pesan politik dari aksi #TuntaskanReformasi yang menempatkan mahasiswa sebagai komunitas politik kepada DPR dan Pemerintah (Anggita 2020). Sementara fenomena masifnya aksi

demonstrasi di lapangan secara *offline* dan aksi digital secara *online* di media sosial pada September 2019 belum ada yang meneliti.

Studi ini akan mengisi kekosongan itu dan mencoba menemukan sebuah kebaruan dengan menganalisis fenomena terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa (*offline*) dengan aksi digital melalui media sosial (*online*) secara bersamaan pada September 2019. Penelitian ini hendak menganalisis mengapa fenomena tersebut dapat terjadi, bentuk koneksi seperti apa yang terjadi antara aksi *offline* dan *online*, serta bagaimana posisi dan peran gerakan mahasiswa di dalam terjadinya aksi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap sebuah fenomena tertentu, khususnya penjelasan mengenai Aksi Demonstrasi Mahasiswa Indonesia pada September 2019 sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Penelitian ini membutuhkan data mendalam dari informan spesifik yang ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, Elizabeth Halcomb (2016) menjelaskan teknik pengumpulan data yang bisa digunakan adalah wawancara untuk mendapatkan data, memahami realitas, dan pemahaman mendalam akan satu fenomena. Maka penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dengan memilih informan spesifik yang akan digali keterangannya seputar aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia pada September 2019. Informan tersebut antara lain para Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari kampus UI, Trisakti, dan ITB serta Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Selain itu, penulis juga mewawancarai beberapa pihak yaitu perwakilan dari NGO (LBH Jakarta dan ELSAM), Perwakilan Organ Ekstra Kampus (Ketua KAMMI), dan seorang *influencer* yang aktif terlibat di media sosial (Dahnil Anzar dan Said Didu). Studi dokumen juga diperlukan dalam penelitian ini, yaitu hasil riset Drone Emprit tentang aksi digital yang terjadi saat aksi demonstrasi mahasiswa September 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Politik Penyebab Kemunculan Aksi Demonstrasi Mahasiswa September 2019

Tahun 2019 adalah masa akhir pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2019, banyak catatan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia dinilai sejumlah pihak mengalami kemunduran



menuju kembali pada rezim. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mengidentifikasi beberapa tanda-tanda yang muncul diantaranya ruang kebebasan sipil menyempit, dan kebebasan berekspresi dan berserikat terancam dengan hadirnya Perppu Ormas, dan praktik UU ITE yang membungkam para aktivis dan pihak oposisi yang kritis terhadap pemerintah (Catatan Akhri Tahun LBH Jakarta, 2019). Kritik lain juga hadir dari para analis di luar negeri. Ed Aspinall (2018), Tom Powel dan Eve Warburton (2018 dan 2019) mengemukakan terjadi kemandekan dan bahkan kemunduran dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Presiden Jokowi mulai melakukan praktik non demokratis seperti membubarkan ormas tanpa proses hukum dan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (detik.com, 3 Agustus 2019).

Situasi tersebut berdampak pada gerakan mahasiswa yang semakin terasa dibatasi ruang geraknya. Pembatasan ruang gerak mahasiswa sudah sampai pada kampus-kampus melalui sejumlah regulasi yang diatur oleh para rektor. Pada saat gencarnya aksi demonstrasi mahasiswa September 2019, pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) saat itu, Mohamad Nasir meminta mahasiswa agar tidak turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi dan mengancam akan memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar. Nasir meminta para Rektor di kampus-kampus agar himbuan pelarangan tersebut dijalankan. Selain mengancam mahasiswa, Menristekdikti juga mengancam tindakan dosen yang mengizinkan mahasiswanya ikut aksi demonstrasi (cnnindonesia.com, 26 September 2019). Sebelum September 2019, sudah sejak 2015 Lokataru Foundation mencatat setidaknya sebanyak 110 mahasiswa mendapatkan sanksi berupa ancaman *drop out* dari pihak kampus karena melakukan aksi demonstrasi. Angkanya semakin meningkat saat terjadi aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019 (Data Lokataru Foundation).

Situasi penuh tekanan dari penguasa tidak menyurutkan langkah mahasiswa untuk terus berusaha memastikan kebijakan negara sejalan dengan kehendak rakyat. Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa tetap berlangsung menyuarakan berbagai tuntutan atas sejumlah permasalahan bangsa yang terjadi sepanjang 2019. Sebelum serangkaian aksi demonstrasi masif pada September 2019, gerakan mahasiswa telah tampil untuk menyuarakan berbagai tuntutan. Pada 10 April 2019, Aliansi BEM SI menggelar aksi 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan bertempat di Gedung KPK. 23 April 2019, Aliansi BEM SI melakukan aksi Ultimatum KPU RI atas sejumlah kecurangan yang terjadi selama perhitungan suara dalam Pemilu. 2 Mei 2019

BEM SI mengadakan aksi demonstrasi di depan kantor Kemendikbud dan Kemenristekdikti dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Instagram BEM SI @bem_si).

Pada sisi lain kinerja eksekutif dan legislatif menunjukkan kinerja yang buruk menurut pandangan gerakan mahasiswa. Muncul sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dianggap oleh gerakan mahasiswa merugikan rakyat. Setidaknya ada dua isu utama yang disorot oleh gerakan mahasiswa dan menjadi penyebab utama munculnya aksi demonstrasi mahasiswa pada September 2019, yaitu revisi UU KPK dan Rancangan KUHP. Mahasiswa menyoroti pelemahan KPK terjadi secara sistematis mulai dari pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK yang bermasalah dari sisi prosedur maupun calon terpilihnya, sampai adanya Revisi UU KPK. Sejumlah poin-poin revisi UU KPK yang telah disahkan dan dianggap masyarakat melemahkan KPK, diantaranya soal Status pegawai KPK diubah menjadi Aparatur Sipil Negara/ASN, Proses penyesuaian yang harus mendapat izin dari Dewan Pengawas, Pembentukan Dewan Pengawas yang anggotanya diusulkan Presiden dan dipilih DPR dan lainnya (cnbcindonesia.com, 17 September 2019).

Selain revisi UU KPK, revisi RKUHP juga menjadi isu yang gencar untuk ditolak oleh gerakan mahasiswa maupun elemen masyarakat sipil. Draft revisi KUHP berhasil dirampungkan DPR dan Pemerintah pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta. Draft tersebut dinilai oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP memuat sejumlah masalah, pemerintah dan DPR pun dianggap secara diam-diam membahasnya. Beberapa poin-poin yang dianggap bermasalah seperti adanya pasal yang memuat hukuman bagi pelaku koruptor lebih rendah dibanding UU Tipikor dan pasal penghinaan Presiden yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara dan tidak sesuai dengan kepastian hukum dan demokrasi (tirto.id, 25 September 2019).

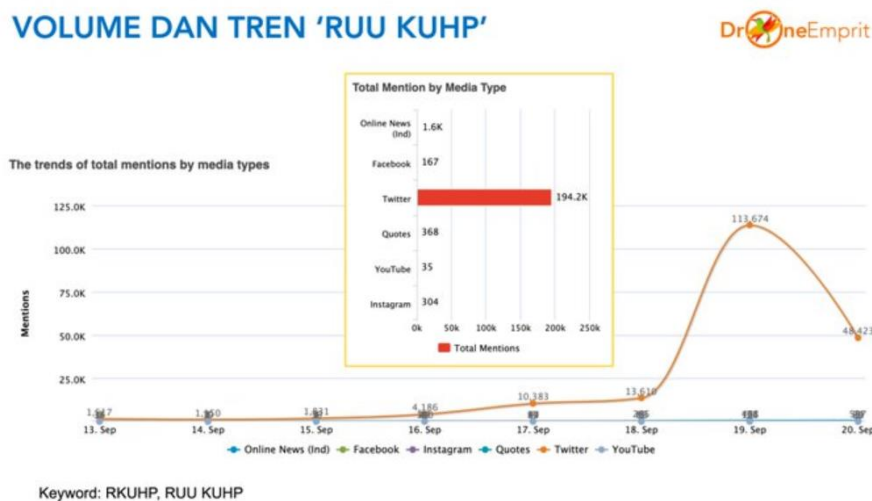
Isu pelemahan KPK dan RKUHP menjadi alasan utama munculnya gelombang aksi demonstrasi yang masif terjadi pada September 2019. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menjadikan aksi KPK sebagai aksi nasional (wawancara dengan M. Abdul Basit, 22 Oktober 2022). Sikap yang sama ditunjukkan oleh KM ITB yang juga menjadikan isu KPK sebagai landasan dalam melakukan gerakan perlawanan (wawancara dengan Royyan Abdullah Dzakiy, 8 November 2022). Dari elemen masyarakat sipil LBH Jakarta memandang dalam Revisi KUHP memuat sejumlah pasal bermasalah seperti hidupnya pasal penghinaan Presiden dan pasal-pasal diskriminatif khususnya bagi kelompok rentan serta mengancam kemerdekaan berpendapat dan demokrasi (Wawancara dengan Arif Maulana, 15 Maret 2022). Begitu juga ELSAM yang menilai banyak sekali pasal-pasal di RKUHP yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok minoritas dan rentan. Termasuk pasal yang berpotensi memberangus kemerdekaan berekspresi. Semua orang berpotensi besar terjerat,



misalnya gelandangan dikriminalisasi, masyarakat sipil juga yang seharusnya dapat jaminan dari negara (wawancara dengan Muhammad Busyrol Fuad, 17 Maret 2022).

Terjadinya *Connective Action* dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa September 2019

Sebelum puncak aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan pada 23-24 September 2019, diadakan aksi pendahuluan pada 19 September 2019 di gedung DPR RI. Ribuan massa aksi hadir untuk menuntut penolakan atas revisi UU KPK dan RKUHP. Aksi ini menjadi pemicu masifnya percakapan dan keterlibatan banyak pihak di media sosial. Data yang diolah oleh Drone Emprit menunjukkan pada 19 September 2019 saat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, tren percakapan tentang RUU KUHP di media sosial melambung naik mencapai 113.674 *mentions* di Twitter.



Sebelumnya, selama periode 12-18 September 2019 total mentions seputar RUU KUHP tertinggi hanya sebesar 13.618 (droneemprit.id, 20 September 2019).

Gambar: Data SNA Drone Emprit tentang RUU KUHP: Semua bersatu menolak.

Dalam percakapan di media sosial, Drone Emprit menangkap inti pesan dari akun-akun yang bersuara tentang RUU KUHP terangkum dalam beberapa tagar, yaitu #SemuaBisaKena, #RKUHPNgawur, #tundademisemua, #TolakRKUHP, #ReformasiDikorupsi, #TundaRKUHP dan tagar #MahasiswaBergerak sebagai titik viralnya. Tagar-tagar tersebut ditujukan dalam

Rangga Kusumo dan Aditya Perdana

Connective Action dalam Gerakan Mahasiswa: Studi Kasus Aksi Demonstrasi Mahasiswa Indonesia Pada September 2019

rangka penolakan terhadap adanya rencana revisi pada RKUHP (droneemprit.id, 20 September 2019).

Terdapat temuan menarik dari data Drone Emprit saat mengidentifikasi akun-akun yang dominan bersuara menolak RUU KUHP di media sosial. Akun-akun tersebut bukanlah akun anonim, melainkan akun-akun yang memiliki identitas jelas. Tingkat interaksi antar satu akun dengan akun lain dalam sebuah postingan sangat tinggi. Dalam satu tweet, ada 7.63 interaksi (*retweet, reply*) yang didapat, menunjukkan percakapan tentang RUU KUHP cenderung natural atau organik. Akun-akun yang dominan menyuarakan menariknya disuarakan juga oleh mereka yang selama ini menjadi pendukung Pak Jokowi seperti akun Alitt Susanto (@shitlicious) dan Ernest Prakasa (@ernesprakasa). Berdasarkan data Drone Emprit, akun @shitlicious mendapatkan *retweet* atau *reply* di Twitter sebanyak 27.787 *engagements* dan akun @ernesprakasa mendapat 17,585 *engagements* (droneemprit.id, 20 September 2019). Kelompok lain yang dominan menyuarakan penolakan adalah akun-akun yang selama ini dikenal sebagai oposisi pemerintahan. Drone Emprit mengidentifikasi akun-akun tersebut dikomandoi oleh Rocky Gerung (@rockygerung), Dahnil Anzar (@Dahnilanzar), dan Said Didu (@saididu). Akun @rockygerung mendapat sebanyak 4.620 *engagements*, akun @Dahnilanzar sebanyak 488 *engagements*. Sementara dari kalangan LSM akun-akun yang dominan menyuarakan adalah ELSAM (@elsamnews) dengan 348 *engagements* dan KontraS (@KontraS) sebanyak 384 *engagements* (droneemprit.id, 20 September 2019).

Dari data yang telah ditunjukkan, tampak akun-akun yang dominan menyuarakan penolakan RUU KUHP terdiri dari beragam kalangan. Terdapat mereka yang selama ini merupakan pihak yang pro terhadap pemerintah Jokowi, ada juga mereka yang dikenal sebagai oposisi, serta dari kalangan LSM. Keterlibatan luas dari beragam kalangan di Twitter untuk turut menyuarakan tuntutan yang sama dengan mahasiswa, yaitu menolak revisi KUHP adalah bagian dari sumber daya moral gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial berupa dukungan solidaritas dan simpatik dari publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bob Edwards dan Patrick F. Gillham (2013).

Partisipasi politik di media digital yang dilakukan oleh Ernest Prakasa, Alitt Santoso, Rocky Gerung, Dahnil Anzar, Said Didu, ELSAM, dan KontraS merupakan bentuk *connective action* sebagaimana yang didefinisikan oleh Bennet dan Segerberg (2013), seorang individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik di media digital tanpa harus terlebih dahulu menjadi anggota atau berkomitmen terhadap kelompok tertentu. Mereka semua bukanlah bagian dari keanggotaan gerakan mahasiswa yang menjadi penggerak untuk mengadakan aksi demonstrasi mahasiswa di jalanan. Dalam logika *connective action*, ikatan yang dibangun atas dasar kesamaan preferensi personal, kepedulian bersama atas isu-isu tertentu. Dalam konteks ini,



penolakan terhadap RKUHP adalah bentuk preferensi personal dan kepedulian bersama yang terbentuk. Berdasarkan *Social Network Analysis* (SNA) RUU KUHP dari Drone Emprit, terlihat tidak terjadi polarisasi, semua akun-akun media sosial yang tertangkap dalam sistem membentuk satu klaster besar berwarna merah yang menandakan semua memiliki sentimen negatif terhadap RKUHP.

Personal Action Frame Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa September 2019

Masih dalam gagasan Bennet dan Segerberg (2013) tentang *connective action*, terdapat istilah *personal action frame*, yaitu pemaknaan yang berbeda-beda antar satu individu dengan individu lain terhadap sebuah isu. Sikap personal mereka di dunia digital terhadap satu isu dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk aksi, seperti *tweet*, membuat video, meme dan sebagainya. Mereka disatukan oleh sebuah tagar (*hashtag*) atau narasi yang sama sehingga dapat terkoneksi menjadi aksi bersama dengan jumlah yang besar.

Berdasarkan data dari Drone Emprit, akun-akun yang teridentifikasi dominan bersuara masing-masing mengekspresikan sikap politiknya dalam bentuk postingan di media sosial yang beragam. Misalnya Ernest Prakasa melalui akun Twitternya @ernesprakasa mengekspresikan sikap politik terhadap RKUHP dengan memberi pesan kepada Presiden RI, Joko Widodo bahwa RKUHP adalah permasalahan serius. Selain itu Ernest dengan bahasa santai khas anak muda mengajak pengikutnya di Twitter untuk terus menyuarakan. Ernest membuat tweet dengan kalimat “RKUHP & RUU-PKS harus terus kita ributin geys” dan menyertakan tautan berita seputar bahaya RKUHP dari BBC News Indonesia. Ekspresi atau ungkapan seseorang yang fleksibel berdasarkan gaya hidup atau profil masing-masing seperti yang dilakukan Ernest dengan bahasa santai juga bagian dari *personal action frame*.

Sementara Alitt Santoso melalui akun Twitter pribadinya @shitlcious mengekspresikan penolakan terhadap RKUHP dengan mengkritik isi RKUHP yang memudahkan rakyat dipenjara karena tuduhan berzina, aborsi, edukasi seks, dan mengkritik pemerintah. Twitter Rocky Gerung @rockygerung dengan celetukan khasnya menilai RKUH sebagai “dungu”. Rocky mengomentari sebuah berita berjudul “RKUHP, Makar Terhadap Presiden Terancam Hukuman Mati” dengan kalimat “UU Terdungu, Ndro :)”. Dahnil Anzar Simanjuntak mengekspresikan *personal action frame* dalam bentuk postingan video yang menunjukkan mahasiswa Muhammadiyah yang sedang menolak Revisi UU KPK dan RKHP di Yogyakarta.

Rangga Kusumo dan Aditya Perdana

Connective Action dalam Gerakan Mahasiswa: Studi Kasus Aksi Demonstrasi Mahasiswa Indonesia Pada September 2019

Postingan tersebut sejalan dengan posisi Dahnil saat itu sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dahnil juga dalam postingan lain di akun Twitternya menilai RKUHP dirancang untuk mempertajam hukum bagi rakyat kecil dan menumpulkan hukum bagi para elit. Sementara Said Didu, sama halnya dengan Alitt Susanto mengekspresikan pendapatnya mengenai RKUHP dengan melampirkan tautan change.org disertai tagar #SemuaBisaKena. Said juga meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui RKUHP dalam Sidang Paripurna DPR.

Dari kalangan LSM, ELSAM melalui akun Twitternya @elsamnews mengunggah poster berisi seruan untuk menyelamatkan demokrasi di akun Twitternya sebagai bentuk *personal action frame* yang dilakukan. Terdapat tagar #TundaRKUHP #TundaDemiSemua #BahasLagi #RKUHPJanganLanggarPrivasi sebagai bagian dari ciri bahwa postingan ELSAM merupakan bentuk *personal action frame* yang akan terkoneksi dengan postingan dan akun lain dalam algoritma di Twitter. Selanjutnya, KontraS sebagai LSM lain yang teridentifikasi Drone Emprit termasuk dominan bersuara mengekspresikan penolakan terhadap RKUHP dengan mengadakan Diskusi Publik bertema “Menelaah Pasal-Pasal Pelanggaran HAM Barat dan Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP”. Melalui akun Twitter @KontaS diposting poster diskusi publik dan menyerukan publik untuk dapat hadir. KontraS juga mengkritik pemerintah dan DPR yang dinilai mengabaikan aspirasi dari masyarakat dan akademisi melalui *tweet* yang dibuat. KontraS menyoroti adanya pasal tentang HAM Barat dan Tindak Pidana Penyiksaan yang masih bermasalah.

Selain menganalisis percakapan seputar RKUHP di media ada periode 13-20 September 2019, Drone Emprit juga memberikan data analisis tentang percakapan isu di media sosial pada periode 23-24 September 2019 sebagai puncak aksi demonstrasi mahasiswa. Didapati temuan bahwa akun-akun Twitter yang terlibat dalam perbincangan terbagi menjadi 4 kluster, yaitu Pro Rezim dan *Give Away*, GenZ/K-Poppers, Aktivis, dan Oposisi. Berdasarkan *Social Network Analysis* (SNA) dari Drone Emprit, pada kluster GenZ/K-Poppers dengan tagar yang diserukan #DiperkosaNegara, akun-akun yang dominan adalah @awkarin dan @BEAUTIFULYOONGO. Kluster Aktivis dengan tagar #ReformasiDikorupsi akun-akun yang dominan banyak dari kalangan aktivis dan artis seperti @ernestprakasa, @Arie_Kriting, dan @Dandhy_Laksono. Sementara untuk kluster Pro Rezim akun-akun yang menjadi *top influencer* adalah @SetiapHariGA @permadiaktivis (droneemprit.id, 25 September 2019).

Akun-akun tersebut melakukan *personal action frame* dengan berbagai macam bentuk sebagai bagian dari ekspresi politik mereka terhadap isu yang sedang hangat diperbincangkan. Mereka membuat *tweet* beragam mulai dari foto, narasi, video, poster dan sebagainya dan disatukan melalui tagar sehingga membentuk kluster-kluster pro rezim maupun mengkritik

rezim. Dari kluster GenZ/K-Poppers, dua akun yang dominan berusara yaitu @awkarin dan @BEAUTIFULYOONGO mereka memposisikan diri sebagai pendukung mahasiswa yang sedang melaksanakan aksi demonstrasi. Akun @awkarin memposting pesan dukungan kepada mahasiswa yang dinilai telah berani turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara yang tertindas disertai dengan tagar #DiperkosaNegara. Sementara akun @BEAUTIFULYOONGO menampilkan gambar saat mahasiswa sedang aksi demonstrasi, menerangkan bahwa gambar tersebut bukanlah sebuah konser Kpop, melainkan mahasiswa yang sedang melakukan protes terhadap pemerintah yang telah membuat sejumlah peraturan yang menyebalkan dan membuat negara seperti pertunjukkan sirkus. Tidak lupa, pada akhir postingan dari @BEAUTIFULYOONGO juga disertai tagar #DiperkosaNegara (droneempri.id, 25 September 2019).

Dari data-data Drone Emprit tersebut, sisi yang menarik dicermati adalah akun-akun lembaga mahasiswa atau personal mahasiswa bukanlah akun yang teridentifikasi menjadi yang dominan bersuara. Padahal mahasiswa merupakan pihak yang menginisiasi terjadinya aksi demonstrasi yang masif secara *offline*. Namun peran gerakan mahasiswa dalam aksi digital secara *online* tampak tidak signifikan. Namun demikian, gerakan mahasiswa yang masif di lapangan telah berhasil membuat berbagai kalangan turut serta terlibat dalam aksi digital.

Meski demikian, sebenarnya elemen mahasiswa tetap terlibat dalam perbincangan di media sosial. Pada beberapa postingan yang diunggah baik oleh akun lembaga mahasiswa maupun personal tetap menyertakan tagar-tagar yang ramai diperbincangkan seperti #ReformasiDikorupsi. Saat konsolidasi akbar 22 September 2019, gerakan mahasiswa menyepakati tagar yang murni diinisiasi oleh mereka, yaitu #TuntaskanReformasi. Namun tagar tersebut tidak sampai teridentifikasi sebagai yang viral atau dominan bersuara berdasarkan temuan Drone Emprit. Gerakan mahasiswa tetap melakukan *personal action frame* dalam berbagai jenis postingan di Twitter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak mahasiswa, penulis tidak menemukan strategi pengelolaan aksi digital yang terstruktur dan terintegrasi. Masing-masing lembaga mahasiswa memiliki strategi digital yang berbeda-beda. Aliansi Mahasiswa Indonesia sebagai aliansi yang disepakati sebagai payung bersama tidak memiliki strategi digital yang detail dan menjadi pegangan bersama semua BEM, kecuali hanya menyepakati tagar

#TuntaskanReformasi sebagai tagar bersama yang akan digunakan (wawancara M. Abdul Basit, 22 Oktober 2021).

Tagar #TuntaskanReformasi baru diputuskan saat konsolidasi mahasiswa 22 September 2019 di Universitas Trisakti. Sementara sebelum itu telah viral dan mendominasi dalam percakapan di media sosial sejumlah tagar, diantaranya #ReformasiDikorupsi dan #MahasiswaBergerak. Tagar-tagar tersebut bukanlah tagar yang diciptakan oleh gerakan mahasiswa, melainkan oleh gerakan masyarakat sipil. Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta sebagai salah satu bagian dari elemen masyarakat sipil dalam wawancara memberikan keterangan bahwa tagar #ReformasiDikorupsi lahir dari Gedung LBH dalam konsolidasi bersama yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil (wawancara Arif Maulana, 15 Maret 2022). Tagar #MahasiswaBergerak juga bukan muncul dari mahasiswa. Berdasarkan analisa dari Drone Emprit, tagar tersebut menjadi titik viral ramainya perbincangan di media sosial pada 19 September 2019. Tagar #MahasiswaBergerak merupakan ekspresi pengguna media sosial merujuk pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada 19 September 2019 di depan Gedung DPR RI. Namun, mahasiswa menegaskan tagar #MahasiswaBergerak bukan merupakan keputusan aliansi mahasiswa (wawancara M. Abdul Basit, 22 Oktober 2021).

Penulis juga berkesempatan mengonfirmasi kepada dua informan wawancara yang teridentifikasi dominan bersuara di media sosial, yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak dan Said Didu tentang alasan mereka turut terlibat dalam aksi digital menyuarakan penolakan terhadap sejumlah RUU, khususnya revisi UU KPK dan RKUHP. Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan keterangan bahwa keterlibatannya dalam percakapan digital merupakan komitmen sejak awal terhadap pemberantasan korupsi. Saat ditanya apakah ada komunikasi dan koordinasi dengan mahasiswa, Dahnil menjawab tidak ada komunikasi dengan elemen mahasiswa semua bergerak secara organik (wawancara Dahnil Anzar Simanjuntak, 30 Maret 2022). Sama halnya dengan Said Didu yang memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya mau terlibat dalam perbincangan di media sosial menolak RUU yang bermasalah, yaitu karena sejak kecil dirinya tidak pernah suka terhadap penyimpangan. Said Didu pun tidak pernah kontak dengan mahasiswa karena khawatir gerakan mahasiswa dituduh ditunggangi (Wawancara Said Didu, 16 Maret 2022).

Dari data dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya aksi digital yang masif di media sosial bukanlah bagian dari desain atau rancangan dari gerakan mahasiswa. Elemen mahasiswa bukanlah aktor yang paling dominan mewarnai percakapan di media sosial, khususnya Twitter. Namun demikian, aksi demonstrasi mahasiswa di lapangan secara langsung menjadi faktor kunci ramainya perbincangan di media sosial. Tanpa aksi demonstrasi mahasiswa yang masif, maka perbincangan di media sosial tidak akan besar dan meluas.



Setidaknya itu dibuktikan dari temuan Drone Emprit yang mengidentifikasi aksi demonstrasi mahasiswa pada 19 September 2019 menjadi titik viral terjadinya perbincangan di media sosial hingga mencapai 114 ribu lebih akun (droneemprit.id, 20 September 2019). Akun-akun yang dominan terlibat dalam aksi digital hampir semua substansinya berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa, baik kesamaan dalam tuntutan yang diperjuangkan (paling dominan seputar RKUHP dan revisi UU KPK), maupun tagar-tagar yang dimunculkan dalam setiap *tweet* yang diunggah. Artinya, terjadi koneksi antara aksi digital dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa secara langsung

***Organizationally-Enabled Action* Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa September 2019**

Selain *personal action frame*, Bennet dan Segerberg (2013) juga menyebut terdapat beberapa tipologi aksi didasarkan pada jejaring yang dihasilkan dan bentuk organisasinya, salah satunya adalah tipologi *organizationally-enabled action*. Pada tipologi *organizationally-enabled action* logika aksi yang dipakai adalah logika *hybrid*, yaitu memadukan *collective action* (partisipasi kolektif secara *offline* langsung) dan *connective action* (partisipasi secara online di media digital) berjalan berdampingan. Struktur formal atau suatu badan organisasi tetap berperan untuk mengoordinasikan aksi. Media digital digunakan untuk membuka secara luas partisipasi individu agar terlibat dalam aksi melalui berbagai kampanye yang dipublikasikan. Seorang individu dapat berpartisipasi baik secara *offline* maupun *online*.

Pada aksi demonstrasi sepanjang September 2019, Aliansi Mahasiswa Indonesia yang terdiri dari kumpulan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan struktur formal yang memiliki peran untuk mengoordinasikan aksi. Koordinator Aksi (Korlap) dari BEM SI, M. Abdul Basit yang juga merupakan Ketua BEM UNJ mendapat tugas untuk mengoordinasikan teknis-teknis aksi dan mengomunikasikan ke kampus-kampus, media, antar aliansi BEM, serta wadah KPK (wawancara dengan M. Abdul Basit, 22 Oktober 2021). Ketua BEM UI, Manik Marganamahendra memiliki tugas mengoordinir lembaganya untuk membuat kajian, juga melakukan koordinasi ke kampus-kampus lain dan masyarakat sipil. Selain itu, sebagai Ketua BEM, Manik juga berperan menjadi Humas dan berkoordinasi dengan wartawan, membuat propaganda, dan memobilisasi massa UI agar datang ke aksi. (wawancara dengan Manik Marganamahendra, 29 Januari 2022). Peran mobilisasi massa aksi juga dilakukan oleh KM ITB yang berhasil membawa massa sekitar 200 orang dari Bandung ke Jakarta. KM ITB mengadakan kajian internal sampai komunikasi ke ketua-ketua Himpunan Mahasiswa agar

Rangga Kusumo dan Aditya Perdana

Connective Action dalam Gerakan Mahasiswa: Studi Kasus Aksi Demonstrasi Mahasiswa Indonesia Pada September 2019

mendapat penerimaan dari kampus, sehingga massa aksi yang terlibat banyak (wawancara dengan Royyan A. Dzakiy, 8 November 2021). Sama halnya dengan ITB, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti juga mengoordinasikan para Ketua Himpunan untuk dapat memobilisasi massa. (wawancara dengan Dinno Ardiansyah, 29 Maret 2022).

Selain adanya struktur formal atau suatu badan organisasi tetap berperan untuk mengoordinasikan aksi, unsur lain dari tipologi aksi *organizationally-enabled action* adalah adanya partisipasi secara luas untuk terlibat dalam aksi melalui berbagai jenis kampanye yang dipublikasikan melalui ruang digital. Dalam konteks ini, aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia pada September 2019 masif diperbincangkan di media sosial serta mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Bukan pihak yang turut serta untuk menyuarakan tuntutan yang diperjuangkan mahasiswa atau hanya sekadar menyatakan dukungan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa. Mereka berpartisipasi hanya secara *online*, tapi juga yang berpartisipasi secara *offline* dan *online*. Berdasarkan data Drone Emprit akun-akun Twitter yang menjadi *top influencer* ikut menyuarakan tuntutan bersamaan dengan gerakan mahasiswa ada yang berasal dari penggemar otomotif sekaligus penulis (Alitt Santoso @shitlicious), seorang pemain film, sekaligus pelawak (Ernest Prakasa @ernestprakasa), sutradara film (M. Irfan Ramli @ipankdewe), seorang aktivis feminis yang saat ini aktif di Jakarta Feminist (Naila Rizki Zakiah @nailacoplacha), akun media massa (@asumsico, @BBCIndonesia), pemain film sekaligus komika (Pandji Pragiwaksono @pandji), seorang jurnalis dan pendiri Watchdog (Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono), dan tokoh oposisi (Dahnil Anzar Simanjuntak @Dahnilanzar dan Said Didu @saididu). Bahkan ada juga akun dari penggemar K-Pop yang pengikutnya didominasi oleh Generasi Z yaitu akun @BEAUTIFULYOONGO. Dari kalangan selebgram juga turun terlibat, yaitu akun @awkarin yang memiliki pengikut jutaan di Twitter, ia memberikan dukungan kepada mahasiswa yang dinilai berani turun ke jalan memperjuangkan hak-hak warga negara Indonesia bahkan sampai ikut turun langsung dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan membagikan nasi kotak (kompas.com, 24 September 2019).

Semua data dan analisis yang telah diuraikan menunjukkan aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia pada September 2019 termasuk dalam tipologi *organizationally-enabled action* sebagaimana yang dikemukakan oleh Bennet dan Segerberg (2013). Aksi demonstrasi tidak hanya ramai secara langsung di lapangan (*collective action*), melainkan juga terjadi aksi digital (*connective action*) secara *hybrid* terjadi masif di media sosial. Aliansi Mahasiswa Indonesia yang terdiri dari kumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus merupakan struktur formal yang mengoordinasikan aksi. Media sosial telah membuat partisipasi publik untuk terlibat dalam aksi menjadi luas secara *online*. Publik turut serta meramaikan media sosial melalui akun Twitter, meskipun mereka tidak terjun langsung dalam



aksi. Semuanya mengekspresikan sikap masing-masing melalui unggahan di Twitter dan saling terkoneksi satu sama lain, terkoneksi dengan aksi demonstrasi mahasiswa melalui kesamaan isu yang ditolak serta tagar yang ditulis dalam *tweet* mereka.

SIMPULAN

Aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia sepanjang September 2019 sebagai bentuk partisipasi *offline* secara langsung (*collective action*) terjadi masif secara bersamaan dengan aksi digital di media sosial (*connective action*). Aksi digital di media sosial tampak dalam aksi *personal action frame* yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa maupun non mahasiswa. *Personal action frame* ditunjukkan dalam bentuk tulisan, poster, video dan lain sebagainya. Postingan satu dengan yang lain saling terkoneksi dan disatukan oleh tagar-tagar seperti #ReformasiDikorupsi, #MahasiswaBergerak, #TuntaskanReformasi, dan #GejayanMemanggil serta narasi yang sama dengan yang dituntut oleh gerakan mahasiswa, yaitu menolak sejumlah RUU bermasalah seperti revisi UU KPK dan RKUHP. Semua akun-akun yang teridentifikasi dominan bersuara di Twitter terkoneksi dengan aksi demonstrasi mahasiswa melalui narasi yang disampaikan berkaitan dengan sejumlah RUU yang dikritik, khususnya revisi UU KPK dan RKUHP.

Aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia pada September 2019 termasuk dalam tipologi *organizationally-enabled action* sebagaimana yang dikemukakan oleh Bennet dan Segerberg (2013). Aksi demonstrasi tidak hanya ramai secara langsung di lapangan (*collective action*), melainkan juga terjadi aksi digital (*connective action*) secara *hybrid* terjadi masif di media sosial. Aliansi Mahasiswa Indonesia yang terdiri dari kumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus merupakan struktur formal yang mengoordinasikan aksi. Setiap BEM memiliki tugas dan perannya masing-masing. Media sosial telah membuat partisipasi publik untuk terlibat dalam aksi menjadi luas.

Meskipun aksi demonstrasi mahasiswa terkoneksi dengan aksi digital, namun penulis tidak menemukan masifnya gerakan digital sebagai bagian dari strategi yang dirancang oleh gerakan mahasiswa. Elemen mahasiswa bukanlah aktor yang paling dominan mewarnai percakapan di media sosial, khususnya Twitter. Tagar yang dibuat oleh mahasiswa yaitu #TuntaskanReformasi tidak teridentifikasi oleh temuan Drone Emprit sebagai tagar yang viral dan dominan dalam aksi digital. Tagar #TuntaskanReformasi kalah viral dibanding tagar

#ReformasiDikorupsi yang dibuat oleh elemen masyarakat sipil. Namun, aksi demonstrasi mahasiswa memang menjadi faktor kunci ramainya perbincangan di media sosial. Tanpa aksi demonstrasi mahasiswa yang masif, maka perbincangan di media sosial tidak akan besar dan meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennet, W. Lance dan Alexandra Segerberg. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Los Angeles: Sage.
- Edwards, Bob dan Patrick F. Gillham. (2013). Resource Mobilization Theory, dalam David A. Snow (eds.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Fahmi, Ismail. (2019). Fix Semua Menolak RUU KUHP. (<https://pers.droneemprit.id/fix-semua-menolak-ruu-kuhp/> diakses 27 Mei 2022).
- Fahmi, Ismail. (2019). GenZ/K-Poppers, Mahasiswa, Aktivis dan Oposisi Semua Bersuara: Analisis Tagar-Tagar Kritikan dan Dukungan. (<https://pers.droneemprit.id/untitled-8/>, diakses 31 Mei 2022).
- Hasanah, Arum Nur. (2007). Transformasi Gerakan Sosial di Ruang Digital. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. (<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/9126/8797> diakses 15 Juni 2021).
- Husin, Luthfi Hamzah. (2014). *Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan: Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari Masa Orde Lama hingga Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Idhom, Addi M. (2019). Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini dan Respon Jokowi Soal RUU KUHP. (<https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV> diakses 17 Mei 2022).
- Khan, Zareen T. (2020). Toolkit for a Successful Movement: Digital Tools in Taiwan's Sunflower Movement. *The SAIS Review of International Affairs*. (<https://saisreview.sais.jhu.edu/toolkit-for-a-successful-movement-digital-tools-in-taiwans-sunflower-movement/> diakses 28 Maret 2021).
- LBH Jakarta. (2019). *Catatan Akhir Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi, Demokrasi di Represi*. Jakarta: LBH Jakarta.



-
- Lokataru Foundation. (2020). *Babak Belur di Kampus Sendiri*. (<https://lokataru.id/wp-content/uploads/2020/02/modul-sejarah-DO-2.pdf> diakses 14 Juni 2022).
- Muflihah, Nadiatul. et al. (2019). Efektivitas Line Group dalam Mendorong Gerakan Mahasiswa Melek Politik. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi (Komuniti)*, Vol 11, No.2 September 2019.
- Nursahid, Wijayanto dan Fajar. (2019). Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini. (<https://news.detik.com/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini> diakses 14 Juni 2022).
- Robet, Robertus. (2020). Civil Society after #ReformasiDikorupsi. (<https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/civil-society-after-reformasidikorupsi/> diakses 16 Maret 2021).
- Setiawan, Tri Susanto. (2019). Aksi Awkarin Terjun ke Tengah Demo Mahasiswa. (<https://www.kompas.com/hype/read/2019/09/24/195015466/aksi-awkarin-terjun-ke-tengah-demo-mahasiswa-di-gedung-dpr?page=all> diakses 31 Mei 2022).
- Scherman, Andrés. et al. (2014). Student and Environmental Protest in Chile: The Role of Social Media. *Political Studies Association*. Volume 35, Issue.2.
- Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan KSM Eka Prasetya UI. (2019). Dibalik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Politik. *Jurnal KSM Eka Prasetya UI* Volume 1, No. 1.
- Wasisto, Aryo dan Prayudi. (2019). Gerakan Mahasiswa dan Upaya Mengurai Polemik Tuntutan. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri DPR RI. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI. No. 19/I/Pulsit.
- (2019). Ini Poin-Poin yang Dinilai Melemahkan dalam Revisi UU KPK. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190917122059-4-99992/ini-poin-poin-yang-dinilai-melemahkan-dalam-revisi-uu-kpk> diakses 13 Mei).
- (2019). Menristekdikti Minta Rektor Cegah Mahasiswa Turun Ke Jalan, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926132947-20-434266/menristekdikti-minta-rektor-cegah-mahasiswa-turun-ke-jalan> diakses 14 Juni 2022).
-

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Busyro Fuad (Manager Advokasi ELSAM) pada 17 Maret 2022.

Wawancara dengan M. Abdul Basit (Koordinator Lapangan Aksi/Ketua BEM UNJ 2019) pada 22 Oktober 2021.

Wawancara dengan Arif Maulana (Direktur LBH Jakarta) pada 15 Maret 2022.

Wawancara dengan Manik Marganamahendra (Ketua BEM UI) pada 29 Januari 2022.

Wawancara dengan Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Trisakti 2019-2020) pada 29 Maret 2022.

Wawancara dengan Royyan Abdullah Dzakiy (Presiden KM ITB 2019) pada 8 November 2021.

Wawancara dengan Ghazi Basyir Amirullah (Koordinator Media BEM SI) pada 22 Oktober 2021.

Wawancara dengan Dahnil Anzar Simanjuntak pada 30 Maret 2022.

Wawancara dengan Said Didu pada 16 Maret 2022.